

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020)

Amanda Yecci Noeng¹, Yuliana Anggreani Dua Delang Kolit², Elisabeth Yessi Da Rato³
Universitas Nusa Nipa^{1,2,3}

yeccinoeng07@gmail.com¹, yulianaanggreani21@gmail.com², yessidarato95@gmail.com³

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2016 - 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 - 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Analisa data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Provinsi NTT melakukan pengawasan atau kontrol terhadap tugas yang telah diberikan kepada bawahannya agar dapat diselesaikan dengan tepat waktu, menghargai keberhasilan pegawainya atas tugas yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci : Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Pertumbuhan ekonomi, dan Kinerja keuangan daerah.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan nasional diarahkan kepada pembangunan yang merata ke setiap daerah, khususnya daerah yang cenderung masih memiliki kelemahan dalam penerimaan pendapatannya. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2016:17).

Untuk itu peningkatannya harus didukung dengan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad 2016).

Pemerintah daerah dituntut untuk bisa lebih mandiri dalam mengelola penerimaan daerah yang ditujukan untuk proses restrukturisasi pembangunan daerah. Pembangunan daerah yang baik dilakukan secara berkelanjutan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Jurnal Accounting UNIPA merupakan wahana hasil penelitian dan telaah konseptual dalam bidang – bidang akuntansi dan keuangan. Jurnal ini diterbitkan sejak tahun 2022, terbit 2 kali setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah, dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam sumber daya keuangan. Untuk itu, diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadikan pemerintah agar lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan baik. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat (Abdullah, 2015).

Salah satu sumber pendapatan daerah yang tercermin dalam APBD adalah pendapatan asli daerah (PAD). PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara teori, ukuran kemandirian daerah diukur dengan PAD yang terdiri dari SPT, retribusi daerah, administrasi milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. PAD menantang daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi seluruh daerah yang digali dari masing-masing daerah. Masalah umum adalah bahwa pemerintah daerah memiliki sedikit kemampuan untuk menghasilkan proyeksi pendapatan daerah yang sangat akurat. Artinya, tidak bisa dikumpulkan secara maksimal. UU No. 1 Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan kelayakan lokal.

Peningkatan PAD, yang dipandang sebagai akumulasi modal yang berasal dari daerah, seharusnya mengarah pada eksternalisasi yang lebih agresif dan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat telah mentransfer dana perimbangan ke masing-masing daerah, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Kompensasi adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan sendiri. Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah, dan antar daerah.

Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi serta menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, analisa kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mendorong atau memotivasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi otonomi daerah. Akibat meningkatnya kinerja keuangan maka secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Provinsi Di Indonesia yang meliputi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini memiliki ibu kota di Kota Kupang dan memiliki 22 Kabupaten/Kota. Provinsi ini berada di Sunda Kecil. Sejak tahun 2001, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah diberikan otonomi seperti provinsi lainnya, memberdayakan daerah untuk menjalankan anggarannya sendiri. Desentralisasi, yang diberikan oleh pemerintah pusat, adalah pelimpahan otonomi yang diamanatkan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah sehubungan dengan kemandirian administratif, politik, dan keuangan. Otonomi fiskal memberikan banyak kelonggaran untuk mengeksplorasi aliran pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada dukungan keuangan pemerintah pusat. Dengan diberikannya otonomi daerah, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur akan memiliki kewenangan yang sama dengan daerah otonom lainnya untuk menggali dan memaksimalkan potensi peningkatan pendapatan daerah. Hal ini berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Ukuran kinerja suatu daerah adalah pendapatan daerahnya sendiri. Pendapatan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur untuk memanfaatkan dan memaksimalkan potensi sumber daya lokalnya. Sumber daya lokal yang ada dapat dimaksimalkan melalui konsolidasi dan ekspansi. Pemberdayaan merupakan inisiatif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dengan memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sumber pendapatan yang ada, sedangkan pemekaran adalah memperluas basis sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Timur. meningkatkan. Provinsi Nusa Tenggara. Pengelolaan dan penggunaan anggaran yang baik oleh pemerintah daerah seharusnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan di daerah otonom. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), Provinsi NTT memiliki tingkat kemiskinan terendah di Indonesia dan menempati peringkat di atas Papua dan Papua Barat secara nasional.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin *et al* (2020) dengan judul “pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan kinerja pemerintah daerah. Transfer Neraca Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Belanja Modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Serentak Asli Pendapatan, Transfer Neraca Fiskal dan Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2017:80) yaitu: “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data – data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan data sekunder yang berasal dari BPK Republik Indonesia/e-PPID Pusat.

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah laporan Realisasi Anggaran seluruh Pemerintah daerah yang terdaftar Di BPK. Terdapat 22 Kabupaten/kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Statistik, Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif kemudian dianalisis dan diolah menggunakan program *software SPSS versi 22 for windows* sebagai alat untuk mengregresikan model yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas pada tabel 1 menunjukkan nilai Asymp. sig. (2-tailed) dari penelitian ini tabel lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00 hal ini berarti data residual tidak berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance seluruh variabel lebih besar dari 0,1 sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas disimpulkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Selain itu, titik-titik tersebar ke atas dan ke bawah angka 0 pada sumbu Y yang berarti tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi. Dari hasil uji autokorelasi diketahui nilai Durbin Watson sebesar 1,835 dan nilai dL = 1,4404, serta nilai Du = 1,8822. Karena nilai d=1.835 lebih besar dari limit du=1.8822 dan lebih kecil dari (4-du)=2.1178 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

Pengujian Model I

Tabel I Analisis Regresi Linear Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|
| | | B | Std. Error |
| 1 | (Constant) | 108.259 | 61.487 |
| | PAD | 4.671 | 1.448 |
| | DP | .829 | 2.402 |
| | PED | 16.298 | 29.915 |

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa model regresi linier berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut : $Y = 108.259 + 4.671(PAD) + 0.829(DP) + 16.298(PED) + e$

Tabel 2 Hasil Uji Statistik F Model 1

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|----------------|-----|-------------|-------|-------------------|
| Mode | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | 800.512 | 3 | 266.837 | 3.774 | .013 ^b |
| Regression | | | | | |
| Residual | 7494.058 | 106 | 70.699 | | |
| Total | 8294.571 | 109 | | | |

a. Dependent Variable: REP
b. Predictors: (Constant), REG, EF, LR, CE

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Table 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi R² Model 1

| Model Summary ^b | | | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------------------------|---------------|
| Model | R | R Square | Adjusted Square | R Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .311 ^a | .097 | .071 | 8.408250 | 1.407 |

a. Predictors: (Constant), PED, DP, PAD
b. Dependent Variable: REP

Sumber : data sekunder yang sudah diolah

Tabel 4 Hasil uji t model 1

| Model | T | Sig. |
|------------------|--------|------|
| 1 (Constan t) | 1.761 | .000 |
| PAD | -3.225 | .000 |
| DP | .345 | .000 |
| PED | .545 | .587 |

Sumber : data sekunder yang diolah

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, namun nilai koefisiennya menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima. Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah karena nilai koefisien menunjukkan arah yang positif. Hal ini dapat diartikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan pengujian hasil statistik, pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi adalah 0,544. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah ditolak.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat ditarik konsep bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, karena nilai koefisien menunjukkan arah negatif. Hal ini dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi dalam hal ini digunakan sebagai Produk Domestik Regional Bruto yang dikaitkan dengan fluktuasi harga pasar tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja keuangan daerah. Dimana naik atau turunnya harga tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan Provinsi NTT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga semakin besar peningkatan PAD maka semakin besar pula kinerja keuangan daerah. Provinsi NTT. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga semakin besar dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin baik kinerja keuangan Provinsi NTT. Sebaliknya, semakin kecil dana perimbangan yang diterima Provinsi NTT, maka semakin rendah kinerja keuangan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah, sehingga naik turunnya pertumbuhan ekonomi di setiap Provinsi NTT tidak mempengaruhi kinerja laporan keuangan daerah.

Dari segi variabel penelitian hanya menggunakan beberapa variabel yaitu pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja keuangan daerah. Diharapkan pimpinan di instansi pemerintah provinsi NTT dapat meningkatkan hubungan antara atasan dan bawahan dimana pimpinan siap menerima saran dan kritik yang disampaikan oleh bawahannya, mengawasi atau mengontrol tugas yang telah diberikan kepada bawahannya sehingga dapat berjalan dengan baik. selesai tepat waktu, menghargai keberhasilan pegawainya atas tugas yang telah dilaksanakan dengan memberikan penghargaan kepada pegawainya yang berprestasi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang berlaku. Diharapkan kepada pegawai pada Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi NTT untuk meningkatkan rasa tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan, mematuhi kode etik di instansi tersebut, dan siap memberikan saran atau kritik kepada atasan jika diperlukan. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang berada di luar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Barat, Medan*, 16–19.
- Afia, M., Alkamil, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2).
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
- Florida, A. (2016). *Analisa Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- G. k E., & Lamawitak L Paulus. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Goo K E Emilianus, L. L. P. (2021). Pengaruh Fraud Diamond Theory Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Koperasi Kredit Pintu Air. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*,

- 5(1), 56–67. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3620>
- Goo, E. E., Herdi, H., & Rusmawati, L. (2023). Analysis of Implementation of SAK ETAP in Presentation of Financial Reports KSP KOPDIT Tuke Jung Head Office. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND SOCIAL SCIENCE (IJEMBIS)* 3.2, 129-139.
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE- Yogyakarta.
- Muda, I. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain – Lain Pendapatan daerah yang sah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderatin*. Universitas Sumatera Utara.
- Pare, A. T. I. M., Dince, M. N., & Goo, E. E. Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8).
- Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Puspitasari, N. L. P. L., Adiputra, M. P., & Sulindawati, N. L. G. E. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–10.
- Rakhmini, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 87–88.
- Sari, I. P., Agusti, R., & Rofika, R. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692. <https://www.neliti.com/id/publications/115984/pengaruh-ukuran-pemerintah-daerah-pad-leverage-dana-perimbangan-dan-ukuran-legis>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 86–97.